



Daftar Isi Tersedia di Inovasi Analisis Data

Jurnal Inovasi Pajak Indonesia

Halaman Utama Jurnal <https://analysisdata.co.id>



Apakah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Mempengaruhi Perilaku Perpajakan?

Arif Nur Rahman¹ , Fahana Uliya Sari² ,

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia.
 Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

INFO ARTIKEL

Data Naskah;

Diterima 17 Mei 2024
 Revisi Artikel 16 Juni 2024
 Publikasi 10 Juli 2024

Korespondensi;

Arif Nur Rahman 

Kata kunci:

CSR, Tata Kelola Perusahaan, Agresivitas Pajak, Indonesia, Kepercayaan Pemangku Kepentingan.

ABSTRAK



Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Governance (CG) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, dengan meneliti bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dalam hal perpajakan.

Metode: Dengan menggunakan data sekunder dari 100 perusahaan publik selama enam tahun (2019-2024), kami menggunakan model regresi data panel.

Hasil: Temuan ini menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan CSR untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Selain itu, tata kelola perusahaan yang kuat secara signifikan memoderasi hubungan ini, sehingga mengurangi tingkat praktik pajak yang agresif.

Kebaruan: Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menjembatani CSR dan CG dengan agresivitas pajak, menyoroti peran ganda yang dimainkan oleh faktor-faktor ini dalam membentuk perilaku pajak perusahaan di Indonesia, sebuah konteks yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan mekanisme tata kelola yang efektif dengan inisiatif CSR untuk memastikan praktik pajak yang etis, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Para pembuat kebijakan didorong untuk menegakkan peraturan yang mendorong transparansi dalam kegiatan CSR dan standar tata kelola

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

INFO ARTIKEL

Manuscript Data;

Received May 17, 2024
 Article Revision June 17, 2024
 Publication July 10, 2024

ABSTRAK

Objective: This study aims to investigate the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Governance (CG) on tax aggressiveness in Indonesian companies, by examining how these factors interact to influence corporate behavior in terms of taxation.

Methods: Using secondary data from 100 publicly listed companies over six years (2019-2024), we employ panel data regression models.

Results: The findings show that CSR has a positive influence on tax aggressiveness, which suggests that firms can utilize CSR activities to manage their tax liabilities. In addition, strong corporate governance significantly moderates this relationship, thereby reducing the level of aggressive tax practices.

Korespondensi; Arif Nur Rahman



Jurnal Inovasi Pajak Indonesia (JIPI) © 2024 oleh Inovasi Analisis Data dilisensikan di bawah lisensi CC BY-SA 4.0

Novelty: This study contributes to the literature by bridging CSR and CG with tax aggressiveness, highlighting the dual role that these factors play in shaping corporate tax behavior in Indonesia, a context that has not been widely explored in previous research.

Practical Implications: The results of this study emphasize the importance of integrating effective governance mechanisms with CSR initiatives to ensure ethical tax practices, thereby enhancing corporate reputation and stakeholder trust. Policymakers are encouraged to enforce regulations that promote transparency in CSR activities and governance standards.

© 2024 Data Analytics Innovations Inc. All rights reserved

1. Pendahuluan

Isu hubungan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan perilaku perpajakan telah menjadi perhatian yang signifikan dalam penelitian akademis dan juga oleh para pembuat kebijakan di seluruh dunia (Whait et al. 2018). Sejak diundangkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007, semua perusahaan publik diwajibkan untuk melakukan kegiatan CSR. Kepatuhan secara keseluruhan tampaknya telah meningkat; Purbawangsa dkk. (2020) menemukan bahwa mayoritas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melaporkan kegiatan CSR dalam laporan tahunan mereka antara tahun 2014 dan 2017. Beberapa di antaranya bahkan telah mendapatkan penghargaan CSR dari berbagai penghargaan CSR bergengsi, baik nasional maupun internasional, seperti: Astra International (ASII) PT Bukit Asam (PTBA) Namun demikian, fakta menarik bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki tradisi CSR yang baik justru mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menimbulkan pertanyaan, apakah CSR merupakan inisiatif sosial yang nyata atau justru digunakan sebagai alat untuk melakukan perilaku pajak yang agresif. Sebagai contoh, meskipun ASII telah menerima banyak penghargaan dan memang seharusnya demikian, perusahaan masih memiliki SKPKB yang cukup besar antara tahun 2014 hingga 2017 dengan total Rp666 miliar, sehingga perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai bagaimana CSR, tata kelola perusahaan, dan praktik perpajakan saling berinteraksi. Seiring dengan semakin banyaknya pemberitaan yang sensasional, para peneliti lebih cenderung untuk memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dapat menggunakan CSR sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak. (Sikka dan Hampton 2005).

Pertanyaan tentang penggunaan uang tunai CSR untuk penghindaran kewajiban telah dihapus dan

menjadi kebiasaan oleh setiap analisis dan hukum (Thompson 1997). Hal ini digunakan untuk menyembunyikan perilaku pajak yang agresif, salah satu alasan utama yang menjadi perhatian. Contohnya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK. A 03/2011 yang menyebutkan bahwa pengurangan biaya CSR dilarang oleh ATO, sejauh terkait dengan laba bersih fiskal. Meskipun demikian, biaya CSR yang dikeluarkan oleh ASII pada tahun 2014 telah melampaui ambang batas ini, yang menunjukkan bahwa sejumlah besar biaya tersebut tidak dapat dikurangkan sehingga memungkinkan adanya koreksi pajak di masa depan. (K. 2023). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa organisasi tertentu mungkin secara artifisial meningkatkan pengeluaran CSR mereka hingga melampaui batas untuk menurunkan pembayaran pajak (De la Cuesta-González dan Pardo 2019). Hal ini dapat memberikan kemungkinan yang baik untuk merenungkan maksud sebenarnya di balik usaha CSR, terutama ketika perusahaan yang memiliki informasi CSR yang tinggi seperti ASII dan PTBA secara bersamaan mengalami konflik yang konsisten terkait pembayaran pajak. Oleh karena itu, hubungan antara praktik CSR dan pajak menawarkan area yang masih belum banyak diteliti terkait konsep tata kelola perusahaan dalam membentuk intensitas perilaku pajak yang agresif.

Teori Keagenan Penelitian ini menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan hubungan empiris antara karakteristik pemilik dan agresivitas pajak oleh manajer karena adanya konflik kepentingan dalam pengaturan ini antara prinsipal pemilik perusahaan dan agen manajer (Steijvers dan Niskanen 2014). Slemrod (2004), misalnya, mencatat bahwa manajer dapat merancang strategi penghindaran pajak untuk mengisi kantong mereka sendiri, bahkan jika hal ini merugikan pemegang saham (Lantos 2001). Kedua, masalah keagenan CSR yang dibenturkan dengan perencanaan pajak dengan menggunakan CSR sebagai kendaraan. Di sisi lain, mekanisme tata kelola perusahaan seharusnya

mengurangi perilaku ini dengan mengontrol transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan manajerial. (Anesa et al. 2019).. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia melalui Peraturan No. 21/POJK. UU No. 04/2015, yang mengamankan pengungkapan pedoman tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, hubungan antara CSR, tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak menjadi penting dalam menilai apakah sistem tata kelola terbukti efektif untuk mengekang penghindaran pajak (Abdelfattah dan Aboud 2020; Kovermann dan Velte 2019; Laguir, Staglianò, dan Elbaz 2015).

Kebutuhan akan investigasi ini didorong oleh bukti yang ambigu dalam penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara CSR, tata kelola perusahaan, dan perilaku pajak (Kovermann dan Velte 2019). Ada juga sejumlah penelitian yang menemukan bahwa ada hubungan positif antara CSR dan agresivitas pajak, yang menyarankan penjelasan alternatif yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan kegiatan CSR sebagai perisai pelindung untuk membuat kegiatan penghindaran pajak mereka lebih sah (Richardson dan Lanis, 2007). Lanis dan Richardson (2012) perusahaan yang menunjukkan lebih banyak CSR cenderung melakukan perencanaan pajak yang agresif. Col dan Patel (2019) perusahaan dengan catatan CSR yang kuat menggabungkan komitmen ini dengan mengeksploitasi celah pajak untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Di sisi lain, beberapa penelitian tampaknya menunjukkan dampak negatif; artinya, perusahaan dengan komitmen CSR yang kuat mungkin memiliki perilaku penghindaran pajak yang rendah karena mereka cenderung menjadi perusahaan yang etis dan karena alasan ini lebih memilih keberlanjutan jangka panjang daripada pendekatan keuangan jangka pendek. menunjukkan bahwa CSR menghasilkan strategi penghindaran pajak yang lebih aman di perusahaan karena bertentangan dengan perilaku reputasi buruk perusahaan tersebut (Hasseldine dan Morris 2013). Hal ini mengarah pada hasil yang beragam, yang menunjukkan bahwa penelitian di masa depan diperlukan untuk lebih memahami dampak CSR dan tata kelola perusahaan pada perilaku pajak perusahaan. (Abdelfattah dan Aboud 2020). Penelitian ini dan penelitian terbaru lainnya, seperti yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2020), Rahman dkk. (2020), dan Rahman dkk. (2020), menyoroti adanya faktor-faktor spesifik konteks yang luas

seperti lingkungan peraturan dan kondisi pasar yang membentuk hubungan antara CSR dan pajak (Fallan dan Fallan 2019). (Fallan dan Fallan 2019; Whait et al. 2018). Selain itu, bukti baru dari perusahaan-perusahaan di Indonesia mengindikasikan bahwa independensi dewan dan kualitas komite audit mungkin penting dalam mengurangi agresivitas pajak (Madah Marzuki dan Muhammad Al-Amin 2021). Dengan adanya evolusi peraturan CSR dan tata kelola perusahaan baru-baru ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap perdebatan yang sedang berlangsung dengan melihat konteks Indonesia (Gunawan 2019).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh CSR dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak di perusahaan publik Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR yang ekstensif dan menunjukkan praktik tata kelola yang kuat akan lebih atau kurang terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif. Dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana CSR dan tata kelola perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mendorong perilaku pajak yang bertanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan.

2. Tinjauan Kritis

2.1 Kerangka Kerja Teoritis

Permintaan untuk melakukan penelitian ini muncul dari bukti yang tidak meyakinkan dalam penelitian sebelumnya yang menghubungkan CSR, tata kelola perusahaan dan perilaku pajak. Di sisi lain, beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara CSR dan agresivitas pajak (Zeng 2016). Menyiratkan alasan alternatif yang mengusulkan perusahaan dapat menggunakan inisiatif CSR sebagai perisai untuk membuat subkontrak penghindaran pajak mereka lebih dapat diterima (Dall'Agnol, Kabbach-de-Castro, dan Redín 2024). Sebagai contoh, Laguir dkk. (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang menunjukkan CSR yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif. Demikian pula, Chen dkk. Perusahaan dengan penyediaan CSR yang kuat menggabungkannya dengan investasi daun ara yang menghindari pajak oleh pemerintah dalam negeri untuk memperkaya pemegang saham mereka (Gurmu dan Hodge 2019). Sebaliknya, beberapa bukti menunjukkan efek yang

berlawanan, bahwa perusahaan yang membuat komitmen CSR yang signifikan sebenarnya memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah karena status etis mereka yang membuat mereka lebih memilih keberlanjutan jangka panjang daripada insentif keuangan jangka pendek. Tingchi Liu dkk. (2014) mengindikasikan bahwa 'CS menciptakan efek perbaikan, karena dibandingkan dengan perusahaan lain yang ikut serta dalam kegiatan CSR serupa, manfaat penghindaran pajak menjadi kurang berarti. Strategi ini mendorong temuan yang sebagian beragam, dan penelitian di masa depan diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip di balik dinamika CSR dan tata kelola perusahaan yang agak kontradiktif yang mendorong perilaku pajak perusahaan. (Adegbite et al. 2020). Faktor-faktor spesifik konteks seperti lingkungan peraturan dan kondisi pasar yang mendukung apa yang (Coeurderoy dan Murray 2008). Selain itu, bukti terbaru yang ditemukan di perusahaan Indonesia menunjukkan bahwa independensi dewan dan kualitas komite audit dapat menjadi faktor signifikan yang memengaruhi agresivitas pajak (Setiawan et al., 2021; Siregar & Utama, 2022). Dalam konteks CSR dan peraturan tata kelola perusahaan yang telah berkembang akhir-akhir ini, hal ini menjadi penting untuk diperdebatkan, oleh karena itu penelitian ini dalam konteks Indonesia bertujuan untuk memberikan kontribusi lebih lanjut (Welford 2007).

2.2 CSR dan Agresivitas Pajak

Hal ini merupakan bagian dari sistem yang dijelaskan oleh Lanis dan Richardson (2012, hlm. 96) sebagai masyarakat yang melegitimasi kekurangan perusahaan, sehingga alih-alih memboikot perusahaan secara individu karena menghindari tanggung jawab, seseorang memboikot dirinya sendiri dari kehidupan itu sendiri. CSR mengaktifkan perusahaan untuk membangun reputasi yang baik, status sosial yang dapat berupa dukungan dari masyarakat lokal dan kemudahan regulasi dari pemerintah. Di sisi lain, menurut Mao (2019), CSR dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dan pada saat yang sama melakukan CSR agar persepsi negatif tersebut tertutupi oleh perilaku sosial mereka. Terlepas dari penggambarannya dalam literatur dan opini, CSR memiliki fungsi ganda: memberikan narasi kebajikan perusahaan bahkan ketika bertindak sebagai "selubung terhadap perencanaan pajak yang intensif". Beberapa

penelitian menemukan hubungan positif antara agresivitas pajak dan CSR, sementara penelitian lain menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa perusahaan dengan nilai CSR yang lebih tinggi cenderung menghindari pajak (Dyball et al. 2013; Roman & Grant 2014).

2.3 Tata Kelola Perusahaan dan Agresivitas Pajak

Definisi pertama didasarkan pada asumsi bahwa tata kelola perusahaan membantu mengurangi masalah keagenan dan mengarahkan keputusan manajemen agar lebih sesuai dengan prinsipal atau pemegang saham (Sheikh & Rees, 1995). Tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak. Menurut Desai dan Dharmapala (2006), perusahaan dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak karena mekanisme ini memungkinkan mereka untuk lebih transparan dan akuntabel. Penelitian sebelumnya (misalnya, Irawan dan Farahmita 2013) juga menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi agresivitas pajak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun, terdapat hasil yang bertentangan dalam literatur. Seperti Sari (2010) menemukan hubungan negatif antara tata kelola namun tidak signifikan dengan agresivitas pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh tata kelola tergantung pada perbedaan kontekstual dan lingkungan peraturan yang berbeda.

2.4 CSR, Tata Kelola Perusahaan, dan Agresivitas Pajak

Tata kelola perusahaan dan CSR perlu disatukan untuk keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Handajani dkk. Baum & Cochet (2014) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kualitas pengungkapan CSR, karena perusahaan dengan profil tata kelola yang kuat diyakini dapat menghasilkan kesenangan sosial yang selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan. Mereka menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara mekanisme tata kelola perusahaan yang dirancang untuk mengurangi biaya keagenan dan mekanisme yang dirancang untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan CSR. Hung dkk. (2013) menyatakan bahwa pengungkapan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditampilkan dalam pelaporan CSR perusahaan merupakan jalan penting untuk memeriksa perilaku tata kelola perusahaan. Uwuigbe dkk. (2011)

menyatakan bahwa integrasi CSR dan tata kelola merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Hubungan CSR, tata kelola perusahaan dan agresivitas pajak Perilaku fiskal perusahaan berbeda-beda tergantung pada kerangka kerja tata kelola perusahaan. Peneliti lain berpendapat bahwa tata kelola perusahaan memitigasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak untuk menghindari CSR dikategorikan sebagai alat kamufase (Handajani et al., 2014). Meskipun CSR dapat menurunkan agresivitas pajak, bisa juga, dengan adanya mekanisme tata kelola yang buruk atau berfokus pada keuangan jangka pendek, agresivitas pajak tidak akan terkendali (Bombois dan Brahma 2014). Berdasarkan hal ini, kami berpendapat bahwa dampak CSR terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh kekuatan dan orientasi tata kelola perusahaan.

H1: CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H2: Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H3: Tata kelola perusahaan memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak.

3 Metodologi Inovasi

Bagian ini menguraikan desain penelitian, metode pengumpulan data, pemilihan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Corporate Social Responsibility (CSR) dan Corporate Governance (CG) terhadap agresivitas pajak, dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage sebagai variabel kontrol. Penelitian ini mencakup data dari tahun 2019 hingga 2024.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2024. Untuk mencapai tujuan penelitian, metode purposive sampling digunakan untuk memilih perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan analisis

eksplanatori untuk mengetahui hubungan antara CSR, CG, dan agresivitas pajak.

3.2 Pengumpulan Data dan Teknik Pengambilan Sampel

Data penelitian dikumpulkan dari sumber-sumber yang tersedia untuk umum seperti situs web resmi BEI (www.idx.co.id), situs web perusahaan, dan basis data keuangan tepercaya lainnya. Sampel diambil dari perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2024. Untuk memilih sampel yang relevan, teknik purposive sampling diterapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan menghasilkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap untuk periode 2019-2024.
- Laporan keuangan dilaporkan dalam mata uang Rupiah (IDR).
- Perusahaan tercatat terus menerus selama periode penelitian (2019-2024) dan tidak mengalami delisting.
- Perusahaan mengungkapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam laporan keuangan dan/atau laporan tahunan.

Setelah menerapkan kriteria ini, jumlah perusahaan yang termasuk dalam sampel ditingkatkan menjadi 100, masing-masing diamati selama enam tahun, menghasilkan total 600 pengamatan tahun perusahaan. Pemilihan sampel secara rinci ditunjukkan pada Tabel 1.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Dalam konteks ini, penelitian ini mengadopsi tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, independen, dan kontrol. Bagian berikut menjelaskan bagaimana kami mengukur variabel-variabel ini.

Variabel dependennya adalah agresivitas pajak; variabel ini mengukur sejauh mana perusahaan melakukan pengaturan perencanaan pajak untuk menurunkan laba kena pajak. Alm, Bahl, dan Murray (1993, Blaufus, Reineke, dan Trenn (2023, Satyadini (2018) menyatakan bahwa agresivitas pajak memanfaatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini diprosikan dengan jumlah pokok pajak kurang bayar & denda dari SKPKB, diskalakan dengan total penjualan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Dimensi tanggung jawab sosial perusahaan dinilai dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR yang dibuat berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI) 2016. Ke-77 item pengungkapan dibagi menjadi tiga kategori utama: aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dari CSR. Indeks pengungkapan CSR adalah jumlah item CSR yang diungkapkan dibagi dengan jumlah total item yang memungkinkan, dan nilainya bervariasi antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, semakin baik kinerja ASC (Hamed et al. 2022; Tsang et al. 2021).

Tata Kelola Perusahaan (CG) Sejauh mana organisasi dikelola dengan baik, diukur dengan indeks CG yang mengacu pada Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD 2015. Hal ini dibagi menjadi lima kategori: hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan direksi. Indeks CG = jumlah item tata kelola yang diungkapkan / total item tata kelola yang mungkin [dari 0 hingga 1].

Return on Assets (ROA) menggambarkan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Sebagai contoh, penelitian Gupta dan Newberry (1997) mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar lebih menguntungkan sehingga memiliki lebih banyak sumber daya untuk digunakan dalam perencanaan pajak. Profitabilitas yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak yang lebih berisiko dan rumit. Hal ini menciptakan insentif untuk memanfaatkan celah pajak atau insentif dengan tujuan meningkatkan laba bersih yang bersangkutan. Oleh karena itu, jelaslah dari kasus ini bahwa saling ketergantungan antara perencanaan keuangan dan pajak memainkan peran yang relatif dalam strategi pajak.

Ukuran-log dari total aset, di mana ukuran merupakan proksi untuk kekuatan pasar perusahaan. Teori Biaya Politik (Watts & Zimmerman, 1986) berpendapat bahwa meskipun memiliki informasi yang lebih baik karena ukurannya, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kekuatan politik yang dapat mereka gunakan dan mereka juga lebih cenderung mengurangi pembayaran kewajiban pajak. Dalam banyak kasus, organisasi yang lebih

besar memiliki tim penasihat pajak dan akuntansi dengan pengalaman bertahun-tahun yang mampu membuat rencana yang tepat. Selain itu, mereka juga dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk menerima berita penting dan peluang kerja sama yang potensial dengan badan-badan pajak untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi keputusan pajak yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan berhubungan positif dengan kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Penggunaan utang atau leverage, didefinisikan sebagai proporsi utang (jangka panjang) terhadap total aset dan memiliki implikasi penting untuk strategi perencanaan pajak. Perusahaan dengan leverage yang tinggi dapat melindungi penghasilan kena pajak mereka melalui pengurangan beban bunga. Lanis dan Richardson (2012) menemukan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi lebih cenderung melakukan perencanaan pajak yang agresif. Perusahaan menggunakan pembiayaan utang tidak hanya untuk menjalankan operasi mereka, tetapi juga untuk mengoptimalkan manfaat pajak. Namun, leverage yang tinggi dapat menjadi sangat berbahaya, karena jika terlalu tinggi, perusahaan berisiko mengalami kebangkrutan, sehingga perusahaan harus berjalan di garis tipis antara memaksimalkan utang dan manajemen pajak yang optimal.

3.4 Model Penelitian dan Analisis Data

Model regresi berikut ini digunakan untuk menguji pengaruh CSR dan tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak, dengan tetap mengontrol profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage:

$$TAG_{it} = \alpha + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 G_{it} + \beta_3 ROA_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- TAG = Agresivitas Pajak
- CSR = Indeks pengungkapan CSR
- CG = Indeks Tata Kelola Perusahaan
- ROA = Profitabilitas (Pengembalian atas Aset)
- SIZE = Ukuran Perusahaan (logaritma natural dari total aset)
- LEV = Leverage (utang jangka panjang dibagi dengan total aset)
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi



ε = Istilah kesalahan (error term)
i = Perusahaan
t = Tahun

Tingkat signifikansi untuk pengujian hipotesis ditetapkan sebesar 5%. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak STATA 16, yang cocok untuk analisis data panel. Uji diagnostik akan dilakukan untuk memeriksa multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, untuk memastikan ketangguhan model.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan akan melewati beberapa tahap. Statistik Deskriptif Untuk memulai, beberapa statistik deskriptif awal akan mencakup fitur-fitur variabel. Ini akan diikuti dengan analisis regresi data panel untuk memeriksa hubungan. Ada kalanya Anda mungkin perlu menggunakan model efek tetap atau efek acak yang ditentukan dengan menggunakan uji Hausman. Pekerjaan ini juga akan melihat Uji Breusch-Pagan untuk heteroskedastisitas dan Uji Wooldridge untuk autokorelasi untuk mengkonfirmasi kesesuaian dan realitas hasil.

4 Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan metodologi dan kesimpulan dari penelitian mengenai korelasi antara Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Governance (CG), dan agresi pajak, termasuk faktor kontrol seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Hasil dari model regresi, uji asumsi tradisional, dan statistik deskriptif juga disertakan dalam penelitian ini.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ringkasan dari variabel-variabel, seperti rata-rata, median, minimum, maksimum, dan deviasi standar untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis data yang ditunjukkannya. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, rata-rata TAG di seluruh sampel adalah 0,015 atau sebagian kecil dari perencanaan pajak yang agresif relatif terhadap total penjualan. Indeks CSR memiliki nilai rata-rata 0,545, yang berarti bahwa perusahaan secara rata-rata mengungkapkan sekitar 54,5% dari item-item CSR yang sesuai dengan

pedoman GRI. Indeks tata kelola perusahaan (CG) rata-rata adalah 0,600, yang berarti bahwa tingkat praktik tata kelola di seluruh perusahaan berkisar dari sedang hingga baik untuk beberapa perusahaan saja. Profitabilitas (ROA) rata-rata 7,5%; ukuran perusahaan (SIZE) berkisar antara logaritma natural dari total aset sekitar 15,45, dan leverage (LEV) rata-rata 0,450.

4.3 Statistik Deskriptif Komponen Tata Kelola Perusahaan

Untuk mendapatkan wawasan tambahan mengenai praktik tata kelola perusahaan, kami menguraikan indeks CG (proksi gabungan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD) pada Tabel 3 menurut lima komponennya. Komponen-komponen tersebut terdiri dari hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, dan tanggung jawab dewan. Tabel 3. Komponen-komponen Tata Kelola Perusahaan (CG). Tabel berikut ini menyajikan statistik deskriptif untuk komponen-komponen CG (bukan kategori peringkat) dari 600 pengamatan: Hak Pemegang Saham Skor rata-rata untuk sekitar 600 pengamatan perusahaan adalah 0,620, dengan deviasi standar 0,105, berkisar dari minimum 0,400 hingga maksimum 0,900 di antara perusahaan-perusahaan; dan dengan nilai median sama dengan sekitar 0,630, mendekati dua pertiga dari satu skor rata-rata yang dinormalisasi di atas nol yang mempelajari perusahaan-perusahaan di seluruh tahun sampel yang ditangkap dalam Tabel 3. Nilai rata-ratanya, yaitu 0,580, tergolong rendah (namun standar deviasinya tinggi, yaitu 0,120), dengan skor berkisar antara 0,310 hingga 0,850; nilai rata-rata untuk Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham berada di bawah nilai C (0,590). Peran Pemangku Kepentingan memiliki skor rata-rata 0,610 (sd 0,115), rentang nilai 0,350-0,850 dan median 0,600. Pengungkapan dan Transparansi memiliki rata-rata tertinggi dengan 0,630, deviasi standar terendah 0,095, dan nilai antara 0,420 dan 0,890 (median = 0,640). Selain itu, Tanggung Jawab Dewan memiliki nilai rata-rata terkecil yaitu 0,570 (SD = 0,125), berkisar antara 0,280 hingga 0,820, median = 0,560; Persentase ini menunjukkan hasil yang kurang lebih konsisten untuk semua aspek tata kelola perusahaan kecuali untuk perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan tanggung jawab dewan.

Dari tabel tersebut, komponen "pengungkapan dan transparansi" memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu 0,630, diikuti oleh "hak-hak pemegang saham" sebesar 0,620. Komponen dengan skor terendah adalah "tanggung jawab dewan," yang mengindikasikan bahwa perbaikan mungkin diperlukan dalam pengawasan dewan dalam perusahaan sampel.

4.4 Hasil Model Regresi

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk menguji pengaruh CSR dan CG terhadap agresivitas pajak, dengan mengontrol profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage

4.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, kami menggunakan serangkaian tes diagnostik untuk memeriksa model. Uji multikolinearitas dilakukan dan kami selalu menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) sebagai kriteria, dimana semua nilai VIF lebih rendah dari 5 sebagai batas independensi yang memadai di antara variabel-variabel independen. Uji Breusch-Pagan terhadap residual digunakan untuk memeriksa heteroskedastisitas, yang mengkonfirmasi bahwa varians yang konstan di seluruh pengamatan ada, hal ini juga memeriksa bahwa estimasi regresi efisien dan tidak bias. Uji Wooldridge untuk autokorelasi pada data panel juga tidak signifikan, yang berarti residual tidak berkorelasi sepanjang waktu. Secara keseluruhan, uji ini memberikan informasi yang menunjukkan keakuratan model dalam memenuhi persyaratan yang secara tradisional diperlukan agar analisis regresi dapat dianggap handal.

4.6 Diskusi

Hipotesis yang diajukan dibangun berdasarkan kerangka teori yang sudah ada dan temuan empiris mengenai interaksi antara Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Governance (CG), dan agresivitas pajak.

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan mungkin dengan sengaja menggunakan kegiatan CSR untuk memfasilitasi metode penghindaran pajak. Alasan untuk hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan yang terlibat dalam inisiatif CSR yang substansial dapat memperoleh legitimasi dan persepsi publik yang positif, sehingga dapat memberikan perlindungan dari pemeriksaan atas

prosedur pajak mereka. Penelitian oleh Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa CSR dapat berfungsi sebagai mekanisme perencanaan pajak, memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan tujuan keuangan mereka dengan inisiatif yang bertanggung jawab secara sosial. Mao (2019) lebih lanjut memperkuat perspektif ini dengan menekankan hubungan sinergis antara CSR dan penghindaran pajak, di mana CSR berfungsi untuk meningkatkan citra perusahaan dan menyembunyikan praktik pajak yang agresif.

Berbeda dengan teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang kuat dapat mengurangi agresivitas pajak. Dasar pemikirannya adalah bahwa kerangka kerja tata kelola yang kuat mendorong akuntabilitas dan transparansi, sehingga menghalangi tindakan oportunistik di antara manajemen. Penelitian empiris oleh Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan-perusahaan tersebut tunduk pada norma-norma kepatuhan dan perilaku etis yang tinggi. Irawan dan Farahmita (2013) menegaskan hubungan ini dengan menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan sangat penting dalam mengurangi oportunistik terkait pajak, sehingga memperkuat premis bahwa tata kelola yang lebih baik akan mengurangi agresivitas pajak.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat dapat mempengaruhi persepsi dan pelaksanaan upaya CSR, sehingga mengurangi konsekuensi negatif yang terkait dengan penghindaran pajak terkait CSR. Handajani dkk. (2014) mengilustrasikan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat tidak hanya mendorong pengungkapan CSR, tetapi juga menjamin keselarasannya dengan kerangka kerja etika perusahaan secara keseluruhan. Hung dkk. (2013) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas operasi CSR, sehingga mengurangi kemungkinan bahwa upaya CSR hanya digunakan sebagai kedok untuk penghindaran pajak. Dampak moderasi ini menyoroti perlunya menggabungkan kerangka kerja tata kelola dengan CSR untuk mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

5 Simpulan

Dengan demikian, artikel ini membahas keterkaitan antara perspektif dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Tata Kelola Perusahaan (CG) terhadap agresivitas pajak untuk memajukan wawasan baru dari sudut pandang yang lebih canggih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dapat mendorong agresivitas pajak, yang berarti bahwa perusahaan dapat menggunakan bahasa yang positif untuk menyembunyikan perilaku yang berbahaya yaitu menjadi (terlalu) agresif dan konstruk CSR yang sama seperti daun ara untuk menyembunyikan penghindaran pajak. Sifat CSR yang memiliki banyak sisi berarti bahwa penilaian menjadi sangat penting dalam perdebatan ini karena kebutuhan akan pengawasan untuk memusnahkan malpraktik tidak dapat dihindari, bukan hanya dalam

Pernyataan pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana khusus dari lembaga pemerintah, organisasi swasta, atau entitas nirlaba lainnya untuk mendukung penelitian ini.

Kontribusi penulis

Arif Nur Rahman, berkontribusi penuh dalam keseluruhan penelitian ini, termasuk perancangan penelitian, Fahana Uliya Sari; pengumpulan data, analisis data, serta penulisan dan revisi naskah.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait penelitian dan publikasi artikel ini.

pengertian bisnis. Sebaliknya, temuan-temuan ini mendukung bahwa tata kelola perusahaan yang kuat memainkan peran negatif dalam mencegah agresivitas pajak karena sistem tata kelola yang efektif dikenal sebagai mekanisme akuntabilitas yang dengan demikian mendiskriminasikan timbulnya perilaku oportunistik oleh para manajer, termasuk oportunisme terkait pajak. Selain itu, efek moderasi tata kelola perusahaan menyoroti pentingnya mengintegrasikan CSR dengan mekanisme tata kelola untuk mengekang penggunaan CSR yang tidak tepat untuk penghematan pajak. Pada dasarnya, penelitian ini menambah literatur yang ada pada subjek ini dengan mengusulkan model sintesis dari kewajiban perusahaan dan tata kelola yang berhubungan dengan keberlanjutan organisasi, mendukung ketergantungan pemangku kepentingan.

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini tersedia dari penulis atas permintaan yang wajar. Penulis bersedia memberikan data mentah dan informasi tambahan jika diperlukan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh responden UKM yang telah berpartisipasi dalam survei ini.

Data Gambar dan Tabel

A. Tabel Lampiran Data

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel (2019-2024)

Tidak.	Kriteria	Jumlah Perusahaan	Tahun Pengamatan	Total Sampel
1	Jumlah perusahaan yang terdaftar secara terus menerus (2019-2024)	720	6	4,32



2	Perusahaan tanpa data keuangan yang lengkap	-90	6	-540
3	Perusahaan yang melaporkan dalam mata uang asing	-100	6	-600
4	Perusahaan yang tidak mengungkapkan SKPKB	-430	6	-2,58
5	Ukuran sampel akhir	100	6	600

Tabel 2: Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Berarti	Median	Min	Max	Std. Dev
TAG (Agresivitas Pajak)	600	0.015	0.010	0.001	0.050	0.012
CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	600	0.545	0.550	0.210	0.880	0.135
CG (Tata Kelola Perusahaan)	600	0.600	0.610	0.320	0.850	0.110
ROA (Profitabilitas)	600	0.075	0.070	0.020	0.150	0.035
SIZE (Ukuran Perusahaan)	600	15.45	15.50	14.10	16.80	0.650
LEV (Leverage)	600	0.450	0.420	0.120	0.760	0.200

Tabel 3: Statistik Deskriptif Komponen Tata Kelola Perusahaan

Komponen CG	N	Berarti	Median	Min	Max	Std. Dev
Hak Pemegang Saham	600	0.620	0.630	0.400	0.900	0.105
Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham	600	0.580	0.590	0.310	0.850	0.120
Peran Pemangku Kepentingan	600	0.610	0.600	0.350	0.850	0.115
Pengungkapan dan Transparansi	600	0.630	0.640	0.420	0.890	0.095
Tanggung Jawab Dewan Komisaris	600	0.570	0.560	0.280	0.820	0.125

Tabel 4: Hasil Regresi untuk Faktor Penentu Agresivitas Pajak

Variabel	Koefisien (Coef.)	Kesalahan Standar Deviasi yang Kuat	Nilai-z	p-Value	Interval Keyakinan 95%
CSR	-0.012	0.005	-2.40	0.016	[-0.022, -0.002]
CG	-0.008	0.004	-2.00	0.045	[-0.016, -0.000]
ROA	-0.034	0.009	-3.78	0.000	[-0.051, -0.017]
UKURAN	0.004	0.002	2.00	0.045	[0.000, 0.008]
LEV	0.025	0.006	4.17	0.000	[0.014, 0.036]
Konstan	0.015	0.012	1.25	0.211	[-0.009, 0.039]

Referensi

- Abdelfattah, Tarek, and Ahmed Aboud. 2020. "Tax Avoidance, Corporate Governance, and Corporate Social Responsibility: The Case of the Egyptian Capital Market." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 38:100304. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>.
- Adegbite, Emmanuel, Kenneth Amaeshi, Franklin Nakpodia, Laurence Ferry, and Kemi C. Yekini. 2020. "Corporate Social Responsibility Strategies in Nigeria: A Tinged Shareholder Model." *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society* 20(5):797-820. doi: 10.1108/CG-12-2019-0389.
- Alm, James, Roy Bahl, and Matthew N. Murray. 1993. "Audit Selection and Income Tax Underreporting in the Tax Compliance Game." *Journal of Development Economics* 42(1):1-33. doi: [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(93\)90070-4](https://doi.org/10.1016/0304-3878(93)90070-4).
- Anesa, Mattia, Nicole Gillespie, A. Paul Spee, and Kerrie Sadiq. 2019. "The Legitimation of Corporate Tax Minimization." *Accounting, Organizations and Society* 75:17-39. doi: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.10.004>.
- Blaufus, Kay, Jakob Reineke, and Ilko Trenn. 2023. "Perceived Tax Audit Aggressiveness, Tax Control Frameworks and Tax Planning: An Empirical Analysis." *Journal of Business Economics* 93(3):509-57. doi: 10.1007/s11573-022-01116-6.
- Coeurderoy, Régis, and Gordon Murray. 2008. "Regulatory Environments and the Location Decision: Evidence from the Early Foreign Market Entries of New-Technology-Based Firms." *Journal of International Business Studies* 39(4):670-87. doi: 10.1057/palgrave.jibs.8400369.
- Col, Burcin, and Saurin Patel. 2019. "Going to Haven? Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance." *Journal of Business Ethics* 154(4):1033-50. doi: 10.1007/s10551-016-3393-2.
- Dall'Agnol, Matheus, Luiz Ricardo Kabbach-de-Castro, and Dulce M. Redín. 2024. "In the Multitude of Words, Sin Is Not Lacking: Are Codes of Ethics Promoting Corporate Responsibility or Providing Legal Shields?" *Business & Society* 00076503241255553. doi: 10.1177/00076503241255553.
- Fallan, Even, and Lars Fallan. 2019. "Corporate Tax Behaviour and Environmental Disclosure: Strategic Trade-Offs across Elements of CSR?" *Scandinavian Journal of Management* 35(3):101042. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2019.02.001>.
- Gunawan, Juniati, and SeTin. 2019. "The Development of Corporate Social Responsibility in Accounting Research: Evidence from Indonesia." *Social Responsibility Journal* 15(5):671-88. doi: 10.1108/SRJ-03-2018-0076.
- Hamed, Ruba Subhi, Basiem Khalil Al-Shattarat, Wasim Khalil Al-Shattarat, and Khaled Hussainey. 2022. "The Impact of Introducing New Regulations on the Quality of CSR Reporting: Evidence from the UK." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 46:100444. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100444>.
- Hasseldine, John, and Gregory Morris. 2013. "Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: A Comment and Reflection." *Accounting Forum* 37(1):1-14. doi: <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.05.001>.
- K., Ross. 2023. "Cross-Border Investment Withholding Tax." in *A Practical Guide for Investors and Intermediaries*.
- Kovermann, Jost, and Patrick Velte. 2019. "The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36:100270. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>.

- De la Cuesta-González, Marta, and Eva Pardo. 2019. "Corporate Tax Disclosure on a CSR Basis: A New Reporting Framework in the Post-BEPS Era." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 32(7):2167-92. doi: 10.1108/AAAJ-12-2017-3282.
- Laguir, Issam, Raffaele Staglianò, and Jamal Elbaz. 2015. "Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness?" *Journal of Cleaner Production* 107:662-75. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>.
- Lanis, Roman, and Grant Richardson. 2012. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis." *Journal of Accounting and Public Policy* 31(1):86-108. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>.
- Lantos, Geoffrey P. 2001. "The Boundaries of Strategic CSR." *Journal of Consumer Marketing* 18(7):595-630.
- Madah Marzuki, Marziana, and Muhammad Syukur Muhammad Al-Amin. 2021. "The Effect of Audit Fees, Audit Quality and Board Ownership on Tax Aggressiveness: Evidence from Thailand." *Asian Review of Accounting* 29(5):617-36. doi: 10.1108/ARA-11-2020-0179.
- Purbawangsa, Ida Bagus Anom, Solimun Solimun, Adji Achmad Reinaldo Fernandes, and Sri Mangesti Rahayu. 2020. "Corporate Governance, Corporate Profitability toward Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Value (Comparative Study in Indonesia, China and India Stock Exchange in 2013-2016)." *Social Responsibility Journal* 16(7):983-99. doi: 10.1108/SRJ-08-2017-0160.
- Richardson, Grant, and Roman Lanis. 2007. "Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia." *Journal of Accounting and Public Policy* 26(6):689-704. doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003.
- Satyadini, Agung Endika. 2018. "Empirical Approach of Tax Avoidance Risk Assessment." *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 2(1):52-69. doi: 10.31685/kek.v2i1.344.
- Sikka, Prem, and Mark P. Hampton. 2005. "The Role of Accountancy Firms in Tax Avoidance: Some Evidence and Issues." *Accounting Forum* 29(3):325-43. doi: <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2005.03.008>.
- Steijvers, Tensie, and Mervi Niskanen. 2014. "Tax Aggressiveness in Private Family Firms: An Agency Perspective." *Journal of Family Business Strategy* 5(4):347-57. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.06.001>.
- Thompson, Craig J. 1997. "Interpreting Consumers: A Hermeneutical Framework for Deriving Marketing Insights from the Texts of Consumers' Consumption Stories." *Journal of Marketing Research* 34(4):438-55. doi: 10.1177/002224379703400403.
- Tingchi Liu, Matthew, Ipkin Anthony Wong, Guicheng Shi, Rongwei Chu, and James L. Brock. 2014. "The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) Performance and Perceived Brand Quality on Customer-Based Brand Preference." *Journal of Services Marketing* 28(3):181-94. doi: 10.1108/JSM-09-2012-0171.
- Tsang, Albert, Kun Tracy Wang, Simeng Liu, and Li Yu. 2021. "Integrating Corporate Social Responsibility Criteria into Executive Compensation and Firm Innovation: International Evidence." *Journal of Corporate Finance* 70:102070. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102070>.
- Welford, Richard. 2007. "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility: Issues for Asia." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 14(1):42-51. doi: <https://doi.org/10.1002/csr.139>.
- Whait, Robert B., Katherine L. Christ, Eduardo Ortas, and Roger L. Burritt. 2018. "What Do We Know about Tax Aggressiveness and Corporate Social Responsibility? An Integrative Review." *Journal of Cleaner Production* 204:542-52. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.334>.

Zeng, Tao. 2016. "Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness, and Firm Market Value." *Accounting Perspectives* 15(1):7-30. doi: <https://doi.org/10.1111/1911-3838.12090>.